

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pertama kali penulis membaca tentang Program Beasiswa Seni dan Budaya yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN, penulis merasa tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan program tersebut.

Penulis tertarik dengan keputusan Pemerintah Indonesia untuk memberikan beasiswa kepada Negara lain, terutama di saat kondisi perekonomian Indonesia belum membaik. Selain itu, penggunaan media kebudayaan sebagai materi program beasiswa juga sangat menarik untuk diteliti.

Forum Dialog Pasifik Barat Daya merupakan forum dialog yang pembentukannya digagas oleh pemerintah Indonesia. Setelah pembentukan forum dialog tersebut, pemerintah Indonesia tidak hanya menempatkan ASEAN sebagai pilar utama pelaksanaan politik luar negerinya, tapi juga mendudukan Forum Dialog Pasifik Barat Daya sebagai wadah kerjasama yang menguntungkan.

Berdasarkan data-data di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan analisa tentang Politik Luar Negeri Indonesia di Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN melalui Diplomasi

kepada Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN. Maka penulis memilih judul : **Politik Luar Negeri Indonesia dalam Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN (Studi Kasus : Beasiswa Seni dan Budaya tahun 2003-2004)**

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum bertujuan untuk meneliti tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di kawasan Pasifik Barat Daya dan ASEAN untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di Negara-negara tersebut. Dimana Indonesia menyelenggarakan Program Beasiswa Seni dan Budaya sebagai upaya untuk meningkatkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Secara khusus, penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wawasan dan pola pikir logis sistematis penulis serta mahasiswa luas.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan seni dan budaya yang begitu beraneka ragam. Masyarakat Indonesia juga telah lama mengaplikasikan berbagai nilai agama yang terasimilasi dalam kehidupan sehari-hari. Selama ini Indonesia dikenal sebagai bangsa yang bermartabat dan berbudaya tinggi.

Indonesia pernah menjadi Negara yang sangat diperhitungkan dalam

.....

menjadi sangat disegani dengan politik bebas aktif untuk selalu menjadi subjek pelaksanaan politik luar negerinya serta menentukan kebijakan luar negerinya sendiri. Indonesia menjadi Negara inisiator pembentukan Gerakan Non-Blok dan ASEAN. "Masa kejayaan" ini juga pernah dialami Indonesia ketika dipimpin oleh Soeharto. Indonesia menjadi Negara memiliki "kemapanan" ekonomi dan memiliki reputasi yang sangat baik di mata internasional.

Namun, anggapan tersebut semakin menurun akibat maraknya berbagai tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Sejak Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi di akhir tahun 1997, banyak kejadian-kejadian yang sangat mengubah persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia.

Permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi dengan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia. Hal ini sangat merugikan Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Investor tidak akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika orang-orang Indonesia identik dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, lemahnya penegakan hukum akan membuat para investor merasa tidak dijamin keamanannya dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah di Indonesia seringkali disertai dengan kekerasan dan tidak jarang menimbulkan jatuhnya korban.

Indonesia membuat masyarakat asing cenderung mengubah penilaian positif mereka terhadap Indonesia. Indonesia menjadi dikenal hanya sebagai Negara yang penuh dengan kekerasan saja. Ditambah lagi dengan liputan media asing yang cenderung memojokkan posisi Indonesia, sehingga merugikan citra Indonesia.

Citra negatif Indonesia ini membuat masyarakat asing takut dan enggan berkunjung ke Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada industri pariwisata Indonesia. Menurunnya jumlah wisatawan asing merugikan masyarakat Indonesia yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata, seperti perhotelan, jasa travel, transportasi, hingga pedagang-pedagang kecil yang menjual berbagai souvenir khas Indonesia.

Indonesia selama ini telah menekankan keberadaan dan partisipasinya dalam ASEAN sebagai salah satu pilar utama kebijakan politik luar negeri. Namun, dengan terjadinya perkembangan dinamis di kawasan Pasifik, khususnya dengan lahirnya Negara baru Timor Leste, serta dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan timur Indonesia, khususnya Papua, Indonesia perlu melakukan langkah strategis diplomasinya di kawasan Pasifik untuk menciptakan situasi kondusif di lingkungan terdekat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menggagas pembentukan Forum Dialog Pasifik Barat Daya, sebagai jembatan hubungan Negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya.¹

Forum Dialog Pasifik Barat Daya secara resmi dibentuk pada Pertemuan Tingkat Menteri I pada 5 Oktober 2002 di Yogyakarta, yang dihadiri oleh perwakilan dari Negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya, seperti Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan keputusan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang di antara negara anggota, termasuk kerjasama di bidang sosial budaya.

Pemerintah Indonesia mempunyai kepentingan yang sangat besar di kawasan ini, sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, selain kawasan Asia Tenggara.² Indonesia perlu untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan Negara-negara di kawasan Pasifik Barat Daya karena kawasan ini mampu mendatangkan devisa bagi Negara dengan kunjungan arus wisatawannya ke Indonesia. Meskipun yang termasuk besar jumlahnya hanyalah Australia, namun hal ini juga bisa menjadi pertimbangan. Selain itu, Negara-negara di kawasan ini juga bisa dijadikan sebagai “pasar” bagi produk Indonesia.

Indonesia juga membutuhkan bantuan Negara-negara di kawasan itu untuk mendukung integritas bangsa Indonesia, terutama dengan adanya gerakan separatisme di Papua yang berada di kawasan Timur Indonesia. Meskipun Negara-negara tersebut “kecil”, namun suara mereka di PBB sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia yang ingin mempertahankan integritas NKRI.

² *Contoh Rata Asia Tenggara dapat dilihat dalam ...*

Wujud nyata kerjasama yang dijalin Pemerintah Indonesia dengan Negara-negara ASEAN maupun Forum Dialog Pasifik Barat Daya (SwPD) adalah “Program Beasiswa Seni dan Budaya” yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada Negara-negara tersebut sejak tahun 2003.

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Mengapa Indonesia menawarkan Beasiswa Seni dan Budaya kepada Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN?”

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melihat permasalahan di atas, terdapat kerangka pemikiran, baik teori maupun konsep yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul. Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu diharapkan terjadi.³ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena tertentu.⁴ Untuk menganalisa permasalahan yang ada, penulis menggunakan teori dan konsep sebagai berikut :

³ Mohtar Mas'ood, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Pusat Studi UGM, Yogyakarta, hal. 181

⁴ Mohtar Mas'ood, *Metodologi Penelitian Hubungan Internasional*, UGM, Yogyakarta, 2000, hal. 100

1. *Konsep Kepentingan Nasional*

Suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain mempunyai politik luar negeri, yaitu kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, khususnya tujuan yang sering disebut sebagai tujuan nasional dan kepentingan nasional.⁵

Kepentingan Nasional adalah konsep yang paling populer dalam analisa hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku internasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah :

*"The fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalize conception of those element that constitute the state most vital needs. They include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being."*⁶

(Kepentingan Nasional adalah tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan, yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan Nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi Negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan Negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.)

Konsep tersebut dapat diartikan bahwa kepentingan pada dasarnya merupakan faktor penting yang menuntun pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri, dimana kepentingan tersebut meliputi :

⁵ Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri RI*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hal. 7

mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan, kedaulatan, keamanan militer, dan ekonomi.

Kepentingan-kepentingan tersebut di atas merupakan hal yang menjadi dasar bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Indonesia tentu memiliki kepentingan yang akan dicapai dalam partisipasinya dalam mengembangkan kerjasama sosial budaya pada Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN. Adapun kepentingan yang ditonjolkan dalam masalah ini adalah kepentingan ekonomi.

Kepentingan ekonomi diartikan sebagai pencapaian kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu faktor untuk mencapai kesejahteraan rakyat adalah dengan meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Untuk menarik kedatangan wisatawan asing, Indonesia perlu melakukan upaya untuk meningkatkan citra positif Indonesia di mata masyarakat internasional.

Peningkatan citra dapat dilakukan dengan meningkatkan hubungan antar masyarakat Indonesia secara langsung dengan masyarakat asing (*people to people contact*). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memberikan Beasiswa Seni dan Budaya kepada masyarakat dari Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN dengan tujuan agar tercipta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat Negara-negara tersebut terhadap Indonesia, sehingga mampu mendorong pencapaian kepentingan ekonomi Indonesia.

2. Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (*The Decision Making Process*) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

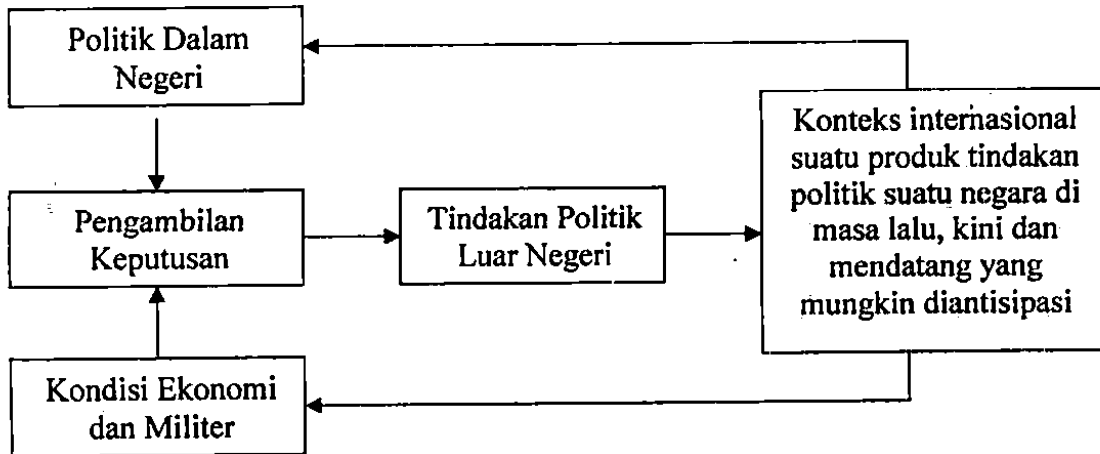
Menurut William D. Coplin, Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri atau *Foreign Policy*, yaitu :⁷

- “Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :
- a. Kondisi politik dalam negeri, termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya.
 - b. Situasi ekonomi dan militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
 - c. Konteks internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.”

7. William D. Coplin, *Foreign Policy*, New York: McGraw-Hill, 1977, hal. 10.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Skema 1 : Pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin

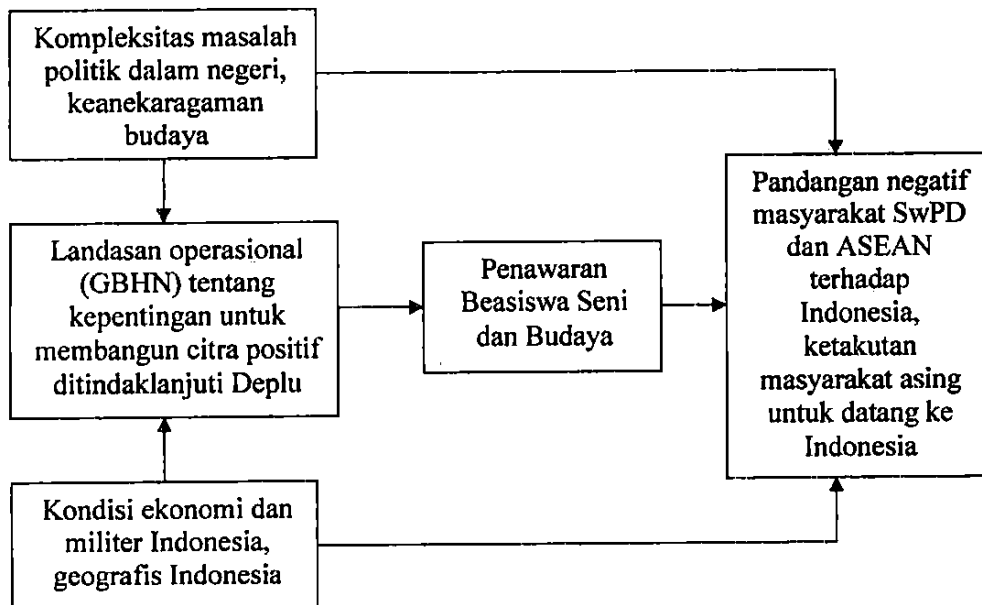


Sumber : Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan William D. Coplin, *Introduction to International Politics : A Theoretical Overview* (Terjemahan : M. Marbun), CV. Sinar Baru, Bandung, 1992, hal. 30

Dari bagan tersebut terlihat adanya saling keterkaitan yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan tindakan politik luar negeri suatu negara.

Dengan dasar teori tersebut bahwasanya untuk menentukan tindakan atau kebijakan luar negeri Indonesia dalam berpartisipasi dalam Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN, Departemen Luar Negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat penting. Skema pembuatan kebijakan dan tindakan politik luar negeri Indonesia dalam Forum Dialog

Skema 2 : Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN



1. Kondisi politik dalam negeri Indonesia yang menghambat

Banyak permasalahan dalam negeri yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Kondisi perekonomian yang terpuruk, krisis politik dan kepercayaan, serta kasus KKN di jajaran pemerintahan yang belum dapat dihilangkan memerlukan penyelesaian lebih utama. Belum lagi ancaman disintegrasi bangsa, seperti kasus Aceh dan Papua, yang juga membutuhkan penanganan yang lebih serius dan tentunya tidak akan lepas dari bantuan negara-negara asing, terutama dari negara-negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia, seperti kawasan Pasifik Barat Daya dan Asia Tenggara.⁸

⁸ http://www.depfin.go.id/buku_puif/riangkasan.htm

Mencuatnya berbagai konflik antar suku di Indonesia yang acapkali dituding dan dikonotasikan sebagai konflik antar umat beragama maupun pandangan sektoral kesukuan yang tidak pada tempatnya, membuat masyarakat dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya memiliki pandangan negatif mengenai kebudayaan Indonesia yang justru menjadi salah satu unsur pemecah kesatuan negara. Selain itu, anggapan yang memandang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan berbudaya tinggi juga semakin menurun akibat maraknya tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Terpuruknya citra bangsa Indonesia tersebut berpengaruh pada pengambilan kebijakan untuk lebih berperan dalam kerjasama internasional, termasuk berperan dalam Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN untuk membangun citra positif Indonesia di mata masyarakat Negara-negara tersebut..

2. Konteks Internasional

Globalisasi dunia yang berkembang sangat pesat dewasa ini telah mendorong suatu Negara maupun kelompok Negara untuk saling meningkatkan interaksinya dan memperkuat kerjasama terutama dengan Negara-negara yang secara geografis saling berdekatan.

Indonesia selama ini telah menekankan keberadaan dan partisipasinya dalam ASEAN sebagai salah satu pilar utama dalam

... ..

dinamis di kawasan Pasifik, khususnya dengan lahirnya negara baru Timor Leste, serta perkembangan ekonomi kawasan Pasifik akibat globalisasi, maka Indonesia perlu melakukan langkah strategis diplomasinya untuk menciptakan situasi kondusif di lingkungan terdekat. Hal ini diwujudkan dengan keikutsertaan Indonesia dalam Forum Dialog Pasifik Barat Daya.

Masyarakat internasional, termasuk masyarakat di Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN memiliki anggapan negatif mengenai Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya untuk mengembalikan citra positif Indonesia di mata masyarakat Negara-negara tersebut khususnya.

Dari kedua sudut pandang tersebut, kemudian diolah dalam sebuah sistem yang dilakukan Departemen Luar Negeri untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan dalam masalah penawaran Beasiswa Seni dan Budaya oleh Pemerintah RI (Departemen Luar Negeri) ini dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan juga penafsiran internal dari Deplu sebagai pengambil keputusan dalam menentukan politik luar negeri Indonesia.

Pengambilan keputusan untuk menawarkan Beasiswa Seni dan Budaya yang pertama kepada negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya (SwPD) pada tahun 2003 merupakan tindak lanjut dari hasil

tahun 2002, dimana disepakati untuk lebih mengembangkan kerjasama pendidikan dan sosial budaya antara negara-negara SwPD.⁹

Dari hasil Pertemuan Tingkat Menteri I tersebut, terlihat bahwa Indonesia ingin mendorong *people to people contact* antar masyarakat di negara-negara SwPD. Pada saat yang bersamaan, Indonesia ingin negara-negara tersebut memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai masyarakat Indonesia. Pada saat itu juga keputusan penawaran Beasiswa Seni dan Budaya itu dimulai.¹⁰

Pelaksanaan program beasiswa tersebut mendapat apresiasi dari negara-negara SwPD pada Pertemuan Tingkat Menteri II di New York pada tahun 2003. Dalam kesempatan itu juga Menteri Luar Negeri RI menyatakan kembali komitmennya bahwa program ini akan dilanjutkan pada tahun 2004. Selain bagi negara-negara SwPD, Menlu juga memberikan petunjuk agar program ini juga diadakan bagi negara-negara ASEAN. Selain itu, Fiji dan Vanuatu (anggota PIF) juga akan dimasukkan dalam program tersebut, mengingat bahwa kepentingan RI yang sangat besar di kawasan tersebut dalam menggalang dukungan terhadap integritas wilayah RI (khususnya Papua). Program seperti ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kawasan Pasifik.¹¹

⁹ <http://www.dep.go.id/category/id/14&org/id/90>

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Laporan Akhir Program Beasiswa Seni dan Budaya *Southwest Pacific Dialogue* dan ASEAN

Analisa pengambilan kebijakan politik luar negeri Departemen Luar Negeri juga dilihat dengan mempertimbangkan untung ruginya. Kondisi ekonomi Indonesia yang lemah membuat Departemen Luar Negeri sulit untuk mengambil kebijakan. Kebijakan penawaran beasiswa seni dan budaya dianggap sebagai langkah yang strategis untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Pelaksanaan program yang berkelanjutan diharapkan lebih mengena, terlebih dalam pelaksanaannya terjadi kontak langsung antara peserta dengan masyarakat (*people to people contact*).

3. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Konsep Diplomasi Kebudayaan secara makro adalah :¹²

usaha-usaha suatu Negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, militer, sosial, kesenian, dan lain-lain dalam percaturan masyarakat internasional.

Diplomasi Kebudayaan adalah sebuah media diplomasi yang efektif dimana merupakan alat penetrasi budaya yang kuat, yang dapat menjadi wadah interaksi budaya dan komunikasi untuk saling memahami kebudayaan masing-masing.

Hal ini disebabkan kebudayaan mempunyai unsur-unsur universal yang berarti bahwa unsur-unsurnya terdapat pada semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia, sehingga pada dasarnya kebudayaan bersifat komunikatif, dapat dipahami bahkan oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Kebudayaan juga bersifat manusiawi, yaitu

¹² Tulus Warsito, *Diplomasi Kebudayaan dalam Strategi Politik Luar Negeri Negara-negara*

dapat lebih mendekatkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sifat positif inilah yang dapat membuka jalan bagi tercapainya diplomasi kebudayaan.

Diplomasi Kebudayaan mempunyai tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi pendapat umum (masyarakat Negara lain) guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar negeri tertentu atau lebih tepatnya lagi guna mempengaruhi kebijakan pemerintah dari Negara yang bersangkutan. Pola umum yang biasanya terjadi dalam hubungan Diplomasi Kebudayaan adalah antara masyarakat (suatu Negara tertentu) dengan masyarakat (Negara lain).

Dalam penyelenggaraan Program Beasiswa Seni dan Budaya, Indonesia mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai Indonesia.

Materi atau isi Diplomasi Kebudayaan adalah segala hal yang makro atau mikro yang dianggap sebagai pendayagunaan aspek kebudayaan (dalam politik luar negeri) antara lain kesenian, pariwisata, olah raga, tradisi, teknologi, sampai dengan pertukaran ahli, dan sebagainya. Sedangkan sasaran utama Diplomasi Kebudayaan adalah pendapat umum baik pada level nasional (dari suatu masyarakat Negara

Bentuk-bentuk konsep Diplomasi Kebudayaan antara lain :

a. Negosiasi

Yang dimaksud dengan negosiasi disini bukanlah sekedar apa yang dirundingkan (dinegosiasikan), melainkan juga cara-cara pelaksanaan negosiasi. Dalam percaturan politik internasional, masalah tempat dimana negosiasi dilaksanakan amat penting untuk dibahas sebelum negosiasi itu sendiri dilaksanakan. Hal itu terjadi karena lingkungan budaya dari tempat yang bersangkutan mau tidak mau akan mempengaruhi keputusan.¹⁴

Diplomasi Kebudayaan dalam bentuk negosiasi mencerminkan keinginan dari bangsa untuk saling memperkenalkan, mengakui, menghormati, dan menghargai kebudayaan masing-masing Negara tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan kerjasama yang lebih khas, seperti pertukaran kebudayaan atau pertukaran ahli.

b. Pertukaran ahli

Diplomasi Kebudayaan dalam bentuk pertukaran ahli ini memang merupakan salah satu jenis hasil dari negosiasi. Tapi dalam hal bentuknya yang khas, dari bentuk pertukaran ahli itu dilakukan dengan cara yang khas, yaitu kerjasama beasiswa antar Negara sampai dengan pertukaran ahli pada bidang tertentu.¹⁵

Dari konsep tersebut dapat dianalisa bahwa kebijakan Departemen Luar Negeri untuk memajukan hubungan seni dan budaya

juga dilandasi oleh pandangan bahwa sangat penting untuk memperlihatkan dan memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia kepada masyarakat asing, terutama di kawasan Pasifik Barat Daya dan ASEAN. Karena selama ini *exposure* yang memberikan gambaran akurat mengenai harmonisasi kehidupan antar umat beragama di Indonesia maupun keanekaragaman budaya dan adat istiadat Indonesia masih sangat kurang, sehingga berpengaruh pada rendahnya pengertian masyarakat asing terhadap *cultural capital* yang dimiliki Indonesia.

Kesepakatan negara-negara anggota Forum Dialog Pasifik Barat Daya pada pertemuan Para Menteri Luar Negeri di Yogyakarta, 5 Oktober 2002, mengawali pengambilan kebijakan Indonesia untuk menawarkan beasiswa seni dan budaya kepada negara-negara anggota Forum Dialog Pasifik Barat Daya pada tahun 2003.

Selama belajar di Indonesia, para peserta program beasiswa diharapkan tidak saja mempelajari ilmu yang ditetapkan dalam program beasiswa saja, melainkan juga mempelajari aspek sosial ekonomi dan politik masyarakatnya, sehingga pada gilirannya nanti para peserta program beasiswa tersebut dapat menjadi komunikator efektif yang menjelaskan kepada dunia luar tentang kekayaan budaya Indonesia, nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi di Indonesia, dan kondisi Indonesia yang aman untuk dikunjungi.

F. Hipotesis

Berdasarkan teori dan konsep yang digunakan dalam kerangka pemikiran, maka dapat ditarik suatu hipotesa bahwa Indonesia menawarkan Beasiswa Seni dan Budaya kepada Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN karena :

1. Indonesia ingin meningkatkan citra dengan cara menciptakan pemahaman yang lebih baik dari kalangan masyarakat Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN melalui kontak langsung antar masyarakat (*people to people contact*);
2. Indonesia ingin mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Indonesia ke masyarakat internasional, khususnya masyarakat Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN.

G. Jangkauan Penelitian

Sesuai judul, studi ini mempunyai jangkauan penelitian pada Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Negara-negara Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN, terutama melalui Program Beasiswa Seni dan Budaya tahun 2003-2004. Untuk menghindari melebarnya penelitian, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu sejak tahun 2003 sampai tahun 2004.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah

yang bersumber dari buku-buku, surat kabar, maupun literatur-literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu, penulis juga mengakses berbagai sumber data dari internet, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan surat-menyurat dengan lembaga terkait yang mendukung dan memperkaya data yang dibutuhkan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi : alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, kerangka penulisan, dan rencana kepustakaan

BAB II Merupakan penjelasan mengenai dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia

BAB III Memuat tentang gambaran umum Forum Dialog Pasifik Barat Daya (SwPD) dan ASEAN

BAB IV Memuat tentang bentuk kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Forum Dialog Pasifik Barat Daya dan ASEAN, yaitu penawaran Beasiswa Seni dan Budaya

BAB V Merupakan kesimpulan, dimana penulis akan menunjukkan hasil yang telah dicapai dari Program Beasiswa Seni dan Budaya terhadap